

SKRIPSI

ETIKA PELAYANAN PEGAWAI DALAM PEMBERIAN IZIN MELAUT

PADA KANTOR PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

PELABUHAN KASSI KECAMATAN KAJANG

KABUPATEN BULUKUMBA



Oleh:

SUDARMAN

02/09/2021

1 exp
Sub. Alumni

R/0102/ADN/21 CD
SUD
e'

Nomor Induk Mahasiswa: 10561 11163 17

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**ETIKA PELAYANAN PEGAWAI DALAM PEMBERIAN IZIN MELAUT
PADA KANTOR PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)
PELABUHAN KASSI KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SUDARMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11153 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal Penelitian : Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin
Melaut Pada Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan
(PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Sudarman

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11163 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Kadir Adys, SH., MM


Dr. Samsir Rahim, S.sos., M.Si

Mengetahui:


Dekan Fisip

Ketua Program Studi

Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Ihyani Malik, S.Sos.Msi


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

NBM: 730727

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/21 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 tanggal

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris






Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM ()
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si ()
3. Dr. Hafis Elfiansyah P., M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sudarman


Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11163 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Sudarman

ABSTRAK

Sudarman. 2021. Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin Melaut Pada Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. (Di bimbing oleh Abdul Kadir Adys, SH., MM Dan Dr. Samsir Rahim, S,sos., M.Si)

Etika pelayanan pegawai adalah suatu praktek administrasi atau pemberian pelayanan yang di dasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku atau kode etik yang mengatur hal-hal perlakuan “baik” yang harus di lakukan atau sebaliknya perlakuan yang “tidak baik” agar di hindarkan dalam suatu pelayanan. Etika pelayanan pegawai di kantor Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di dalam memberikan pelayanan perlu mengetahui prinsip-prinsip etika pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika pelayanan pegawai dalam pemberian izin melaut pada kantor Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang dianggap dapat memberikan informasi terperinci terkait etika pelayanan pegawai.

Hasil penelitian ini menunjukkan 7 (tujuh) prinsip etika pelayanan pegawai pada kantor pangkalan pendaratan ikan, yaitu: 1) kejujuran pegawai dalam pemberian pelayanan yang terakit dengan proses pelayanan sudah sangat jujur dan pemberian biaya administrasi serta pembayaran lainnya diberikan atas dasar kebijakan yang telah dibuat akan tetapi masih ditemukan pembayaran yang tidak memiliki bukti pembayaran. 2.) integritas yakni pengerjaan surat izin melaut yang masih berubah-ubah atau masih tidak konsisten dalam pemberian pelayanan dan banyak mendapatkan respon negatif terhadap pengerjaannya karena sangat menyusahakan nelayan dalam pengurusan berkas. 3.) setia yakni kesetiaan dalam melakukan pelayanan yang boleh di katakan sudah sangat baik atau sangat loyalitas karena pelayanan di kantor PPI 24 jam pelayanan yang sangat memudahkan nelayan dalam melakukan pembongkaran hasil laut dan pengurusan surat izin melaut. 4.) Adil yakni keadilan pegawai dalam pemberian pelayanan seperti tidak memihak pada pangkat dan kasta sudah di terapkan dengan baik. 5.) perhatian yakni memperhatikan keluhan yang di terima oleh masyarakat dan bagaimana cara memberikan kebaikan agar masyarakat merasa nyaman dalam melakukakan pelayanan dan prisip seperti ini sudah diterapkan dengan baik. 6.) hormat yakni sikap pegawai dalam pemberian pelayanan yang tidak emosional dan sangat menghargai dalam pelayanan. dan terakhir, 7.) keunggulan pegawai yaitu dapat memberikan hal-hal positif dalam pelayanan yang sejauh ini belum di terapkan dan belum terlihat di mata nelayan.

Kata Kunci: Etika pelayanan, Pegawai

KATA PENGANTAR

Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin Melaut Pada Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas skripsi ini tidaklah mudah, namun penulis menyadari begitu banyak pihak yang senantiasa membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih yang istimewa dan terdalem penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudirman dan Ibunda Ani, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan, doa dan dorongan semangat yang sangat luar biasa dari beliau yang selalu rela melakukan segala hal, memberikan motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada Bapak Abdul Kadir Adys, SH., MM selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan menasehati penulis dari awal masa perkuliahan hingga saat ini. dan Dr. Samsir Rahim, S.sos., M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan

waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, melakukan koreksi dan perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada Ibunda Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan semua pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin. Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Agustus 2021



Sudarman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep Etika Administrasi	11
C. Kerangka Pikir	23
D. Fokus Penelitian	25
E. Definisi Fokus	25

BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Informan.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
F. Teknik Pengabsahan Data.....	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan Penelitian.....	82
BAB V. PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2.2 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin Kecamatan Kajang.....	37
Tabel 4.2 Produksi perikanan Kecamatan Kajang Tahun 2020.....	38
Tabel 4.3 Jumlah fasilitas di PPI Kassi Kajang.....	40
Tabel 4.4 Jumlah Kapal dan Kelengkapan Surat Izin.....	41
Tabel 4.5 Pembuatan SLO.....	43
Tabel 4.6 Pembuatan SPB.....	44
Tabel 4.7 Ketentuan Penangkapan Ikan.....	45
Tabel 4.8 Aktivitas masyarakat di lingkup PPI Pelabuhan Kassi.....	51
Tabel 4.9 Pembayaran di Lingkup PPI Pelabuhan Kassi.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi tingkat pengetahuan masyarakat semakin luas, kritis, berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut pemerintah untuk merubah peranan dan posisinya (revitalisasi) dalam melakukan pelayanan yang baik. zaman pembaharuan atau reformasi sama dengan demokrasi jika di lihat dari sudut pandang ilmu politik, dimana memiliki tujuan akhir membentuk *Clean Government* dan *Good Governance*. Imawan dalam Yuniningsih, (2018) menjelaskan bahwa *Clean Government* adalah susunan pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya pendapat yang kurang baik yang datang dari masyarakat, kemudian menghindari terjadinya penyalahgunaan otoritas (*abuse of power*). Untuk itu, sangat diperlukan dari kebiasaan suka memerintah atau mengatur diubah menjadi lebih melayani masyarakat dan yang lebih suka memanfaatkan kekuasaan diubah menjadi suka membantu, semuanya menuju ke arah kolaboratis, fleksibelitas dialogis, dan menghilangkan cara-cara yang sloganis. Dari cara kerja yang realistik pragmatis terhadap kondisi masyarakat seperti gambaran yang telah di sebutkan, pemerintah harusnya dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, efesien, efektif, transparan, serderhana, tepat waktu, terbuka, responsif, adaptif dan sekaligus dapat menciptakan kualitas manusia, dalam artian meningkatkan daya kapasitas individu dan masyarakat agar aktif menentukan masa depannya sendiri.

Kondisi pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh aparat pemerintah sering kali mengabaikan norma dan etika dalam memberikan suatu pelayanan, sehingga banyak menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan terjadi. Norma etika merupakan aturan tingkah laku manusia dalam bertindak. Jadi, secara defenisi dapat diartikan bahwa norma etika menurut filosopi Pancasila yaitu sikap mental dan nilai moral yang terwujud suatu tindakan lahiriah dalam pergaulan hidup kenegaraan dan kemasyarakatan dalam segala bidang yang bersifat administratif, managerial dan organisasional yang berlandaskan terhadap Pancasila. Etika diartikan mental dan moral. Mental adalah kekuatan pemikiran (*intelegensia*) yang dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu, dan moral dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh karena itu, penerapan suatu pedoman atau aturan sangat penting guna melakukan pembenahan etika dan upaya meningkatkan kualitas dari aparat pemerintahan (Yuniningsih, 2018).

Masalah etika dalam pemerintahan menjadi keprihatinan (*concren*) yang perlu dibenahi, karena dapat dikatakan perilaku pemerintah berpengaruh bukan hanya pada dirinya, tetapi kepada masyarakat luas. Di samping itu, pemerintah menjalankan tugasnya atas dasar kepercayaan dari masyarakat, karena aparat pemerintah bekerja untuk negara dan juga untuk rakyat. Jadi, sangat wajar jika masyarakat mengharap adanya jaminan bahwa para aparat pemerintah yang dibiayai oleh negara harus mengabdikan kepada kepentingan umum menurut standar etika dan bekerja dengan sebaik mungkin. Salah satu penyebab runtuhnya kualitas birokrasi dimata rakyat adalah dikarenakan birokrasi tidak dijalankan secara

rasional, dimana pemerintahan mengabaikan sikap konsisten dalam pelaksanaan tugas. Fenomena tindakan penyelewengan perilaku birokrasi dalam paradigma etika dapat dijumpai dimana-mana. Penyebab hal tersebut dikarenakan birokrasi tidak dapat menempatkan diri sebagai institusi yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beberapa fenomena mengenai birokrasi yang buruk penuh dengan unsure KKN, sentralistik, berbelit-belit dalam pelayanan dan kekuasaan yang berlebih-lebihan nampak dalam perilaku birokrasi pada semua sektor pelayanan publik pemerintahan (Hasanah, 2019).

Pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa para aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa para aparat pemerintah harus mematuhi kode etik dan kode perilaku pegawai, diantaranya: melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. (Sukri et al., 2017)

Menurut Bertens etika merupakan kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Chadler dan plano menjelaskan empat sub aliran dalam etika, pertama yaitu *Empirical theory*, etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum. Kedua yaitu *Rational theory* yaitu baik buruknya suatu perbuatan tergantung pada suatu alasan dan logika yang melandasi perbuatan tersebut. Ketiga yaitu *Intuitive theory*, etika tidak timbul dari pengalaman atau logika seseorang, tetapi dari perasaan atau hati nurani. Keempat yaitu *Revelation theory*. Etika bermula apabila seseorang melakukan suatu tindakan terhadap pendapat

kita, karena biasanya pendapat kita berbeda dengan pendapat orang tersebut. Oleh karena itu perlu mengetahui apa itu etika dan mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang tersebut Umam (2019).

Penilaian tentang krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan, dan krisis kepribadian tersebut lebih banyak di arahkan kepada para pejabat publik atau pejabat pemerintahan/birokrasi, karena merekalah sebagai pengendali bahtera kehidupan bangsa dan negara ini dan merekalah yang dianggap pemimpin bangsa selama ini untuk menuju tujuan negara yang dicita-citakan dan dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Singkatnya, secara etis para pejabat publik inilah yang mempunyai tanggung jawab moral dalam mengatur dan memimpin kehidupan bangsa dan negara dan memberikan pelayanan terhadap publik yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka (Daulima, 2018). Karena kita ketahui jika para pejabat publik (pemerintah) menjalankan tugasnya dengan tidak baik maka akan berdampak pada organisasinya.

Organisasi di katakan berhasil apabila pelayanan yang ada di dalamnya sudah berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya jika penerapan pelayananya kurang baik, dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut tidak berhasil dalam melakukan suatu pelayanan. Hal seperti inilah yang biasanya terjadi di lapangan, pelayanan yang kurang baik membuat sebagian masyarakat merasa jenuh atas kebijakan yang diterima. Seperti ketidakpastian prosedur pelayanan dan menstimulasi masyarakat untuk melakukan hal-hal negatif seperti membayar pungutan liar kepada petugas atau menggunakan jasa calo, agar kepastian pelayanan bisa segera di peroleh. Pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan

publik seperti ini sulit ditelusuri dan dibuktikan, karena kebiasaan masyarakat yang menganggap tabu dalam “membuka aib”, termasuk dalam permasalahan pelayanan publik. Sisi lain menghadapi tantangan yang semakin berat karena standar penilaian etika sering berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Dapat dikatakan tidak mudah mencapai kedewasaan dalam beretika, oleh karena itu kemungkinan besar pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi, Bisri & Asmoro, (2019).

Seperti itulah yang terjadi di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan hal-hal yang termasuk masalah etika dalam pelayanan. Seperti pada saat pengurusan pembuatan surat izin melaut, banyak masyarakat yang mengeluh atas kebijakan yang di terima karena pada saat pembuatan surat izin tersebut pegawai yang ada di kantor tidak melayani dengan baik seperti pelayanan yang berbelit dan tidak menentu. Kemudian Tingkat ke disiplinan pegawai yang masih rendah sehingga menimbulkan ketidak pastian waktu pelayanan kepada nelayan. Selain itu terakit dengan pembayaran administrasi atau pembuatan surat izin di mana nelayan semacam di bodohi atau di tipu dan pembayaran terbilang cukup mahal.

Dari latar belakang tersebut, penulis membatasi masalah yang hanya berfokus pada Etika Pelayanan Pegawai. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin Melaut Pada Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan prinsip Etika pelayanan di Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di lihat dari aspek: Kejujuran, Integritas, Setia, Adil, Perhatian, Hormat dan keunggulan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan prinsip Etika pelayanan di Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba di lihat dari aspek: Kejujuran, Integritas, Setia, Adil, Perhatian, Hormat dan keunggulan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka kegunaan penelitian, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah kajian dan wawasan tentang penerapan Prinsip etika dalam organisasi pemerintahan dan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya tentang etika administrasi dikantor pemerintahan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktisi

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini;

- a. Dapat di gunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan prinsip etika dalam pelayanan.
- b. Dapat di gunakan sebagai bahan rekomendasi/ masukan bagi pihak dikantor PPI Pelabuhan Kassi
- c. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu tentang prinsip etika dalam pelayanan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan sebagai rujukan penelitian atau sebagai acuan analisis perbedaan untuk menganalisa perbedaan atau persamaan dalam penelitian.

Berikut table penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Satibi & Ediyanto, (2020)	Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance	Maraknya fenomena yang mencerminkan buruknya etika dan perilaku aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Kemudian merebaknya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sejumlah penyimpangan perilaku diberbagai level pemerintahan mencerminkan etika dan	Mengarah pada etika dalam penguatan Good Governance

			perilaku memprihatinkan sehingga membutuhkan penataan dan perbaikan.	
2.	Kurniawati et al, (2018)	Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya”	Masih banyak pegawai yang ditemukan datang terlambat. Disisi lain terdapat pegawai datang sesuai jam kerja tetapi dalam peraktinya, pegawai tersebut ngobrol dan berdandan terlebih dahulu disaat jam kantor sudah di buka dan menunda pekerjaan. Hal sperti ini menunjukkan bahwa penerpan etika admnistrasi masih rendah.	Menarah pada penerapan Etika administrasi dalam menegamban kualitas ASN.
3.	Soamole et al, (2015)	“Implementasi Kebijakan Etika Pegawai	Penerapan kode etik belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan beberapa fator seperti masih	Mengarah pada penerapan kebijakan

	Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara”	adanya Pegawai yang tidak mengetahui dan tidak memahami peraturan tentang etika PNS. Selain itu kurang disiplin. kurang bersemangat, kurang tanggung jawab, kurang kerjasama, tidak suka mengambil inisiatif, tidak suka memanfaatkan waktu kerja secara optimal	Etika Pegawai.
--	---	--	-------------------

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Pada penelitian terdahulu **Satibi & Ediyanto, (2020)**, menjelaskan tentang Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. Kemudian **Kurniawati et al, (2018)** menjelaskan tentang Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya, **Soamole et al, (2015)** menjelaskan tentang implementasi kebijakan etika pegawai. Dan terakhir penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu Etika pelayanan pegawai dalam pemberian izin melaut pada kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI) pelabuhan kassi kecamatan kajang kabupaten bulukumba. Yang mana

menjelaskan bagaimana etika pegawai dalam memberikan pelayanan.

B. Teori dan Konsep Etika Administrasi

1. Pengertian Etika

Istilah Etika memiliki berbagai macam pengertian tergantung pada sudut pandang dan kedudukannya. Etika diangkat dari bahasa Yunani “Ethos” yang memiliki arti; kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Adapun etika “*ethikos*” yang berarti “timbul dari kebiasaan” merupakan cabang utama ilmu yang mempelajari nilai atau kualitas hidup yang menjadi pembelajaran mengenai standar dan penilaian moral (Umam, 2019).

Berikut pengertian etika menurut para ahli:

1. Ahmad amin dalam Umam (2019) menyatakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari sifat baik buruknya manusia, dan apa-apa yang seharusnya dilakukan terhadap manusia yang lainnya.
2. Haryanto (Umam, 2019) menyebutkan bahwa etika merupakan hal penting dalam hidup bermasyarakat karena menuntun perilaku seseorang agar mampu menjalankan fungsi dengan baik dan dapat lebih bermoral.
3. Bertens menjelaskan etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi landasan seseorang dalam mengatur kepribadiannya. (Bisri & Asmoro, 2019)
4. Widjaja menjelaskan istilah etika (*ethics*) dalam bahasa Latin disebut “*ethicus*” yang berarti adat, kebiasaan, atau kesediaan jiwa akan kesusilaan, Sangat identik dengan kata moral yang juga berarti adat atau cara hidup. Lebih lanjut Widjaja menggambarkan bahwa sebagai cabang filsafat, etika mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan

merupakan hal yang harus diperhatikan karena ini menyangkut dengan pelayanan terhadap masyarakat dan keberhasilan suatu organisasi. Kode etik bagi aparat pemerintah termasuk pegawai negeri diatur dalam peraturan perundangan-undangan No. 42 Thn 2004 tentang pembinaan Jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri. Kode etik pegawai dalam hal ini diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari. PP ini dirumuskan untuk etika pegawai, baik etika profesional, etika organisasi, etika sosial, maupun etika personal (Umam, 2019). Sementara Titus dalam (Febrie, 2017) menyebutkan etika perlu menjadi spirit atau penyemangat bagi birokrasi karena sangat di perlukan sebagai cara untuk menemukan hal yang benar dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa. Etika diperlukan sebagai kode moral dalam masyarakat yang meliputi prosedur, prinsip dan aturan berperilaku. Etika dapat mendorong manusia kearah yang lebih baik yakni perilaku di dasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Sistem etika juga tetap perlu dikritik secara wajar, agar nilai-nilai etis dapat berkembang kompatibel (selaras) menyesuaikan perkembangan zaman.

Selanjutnya Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi standar etika. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengarahkan para pejabat publik harus mematuhi kode etik dan perilaku pegawai yang terdiri dari cermat dan disiplin, sopan, tanpa tekanan, serta menjaga kerahasiaan yang menyangkut tentang kebijakan negara. Pada pelaksanaan tugas-tugas yang ada di dalam institusi, para aparatur sipil negara harus memiliki tanggung jawab kepada publik salah satunya adalah dalam perwujudan (Kurniawati et al.,2018).

2. Pengertian Administrasi

Ilmu administrasi dimaksud sebagai hasil pemikiran manusia yang disusun berdasar pemikiran yang rasional dan sistematis yang memberi tahu kejelasan tentang objek formal, yaitu pemikiran yang mengatur keteraturan yang dilakukan manusia dengan menggunakan objek material menuju terwujudnya tujuan tertentu.

Secara etimologi, administrasi di artikan sebagai proses melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan, mengarahkan, menghasilkan, mengelola, mengatur, mengurus, mengusahakan, dan mendayagunakan. Berikut pengertian administrasi menurut para ahli:

Leonard D. White dalam Umam (2019) mengemukakan bahwa administrasi adalah proses umum yang ada pada setiap kelompok, baik itu pemerintah, swasta, sipil maupun militer, yang berukuran besar maupun ukuran kecil. Herbert A Simon (Umam, 2019) merumuskan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Wilson (Umam, 2019) menjelaskan etika administrasi sebagai upaya menaruh perhatian terhadap pelaksanaan administrasi pada suatu konstitusi negara. Jadi, sangat jelas bahwa tujuan administrasi negara (publik) adalah menyelenggarakan kegiatan administrasi secara baik dan benar, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Artinya, ketika etika administrasi diterapkan dengan baik oleh penyelenggara negara (pemerintah), maka etika kehidupan berbangsa akan berlangsung dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila etika administrasi tidak berjalan dengan pergerakan sesungguhnya maka

akan banyak masalah yang berdampak dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses umum yang dilakukan sekelompok orang dalam satu wadah tertentu kemudian bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.

3. Pengertian Etika Administrasi

Etika administrasi atau biasa disebut etika administrasi negara atau publik adalah seperangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman, referensi, sekaligus standar penilaian baik buruknya sikap, tindakan, dan perilaku administrasi (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas. Etika administrasi berusaha menempatkan kaidah-kaidah moral dan etika dalam menghadapi berbagai dilema dalam masalah yang menyangkut dengan kepribadian seseorang terhadap interaksinya dengan negara maupun masyarakat (publik). Berikut pengertian etika administrasi negara atau publik:

Menurut Widodo dalam Umam, (2019). menjelaskan etika administrasi sebagai bentuk pengawasan terhadap administrasi negara atau publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Apabila dalam administrasi menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik, dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan kewenangannya harus menyadarkan pada etika administrasi negara atau publik Kemudian The Liang Gie dalam Kertha, (2018) mengartikan Etika Administrasi Negara atau publik sebagai bidang pengetahuan tentang ajaran moral dan azas-azas perlakuan yang baik bagi administrator pemerintahan dalam menunaikan tugas pekerjaannya dan melakukan tindakan jabatannya.

Etika administrasi merupakan bidang ilmu pengetahuan tentang ajaran-ajaran moral dan asas-asas perlakuan yang baik bagi para pejabat public (pemerintah) dalam menjalankan tugas seperti pekerjaan dan melakukan tindakan jabatannya. Etika administrasi publik menjelaskan berbagai asas etis seperti pedoman perilaku, dan standar kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur pemerintah guna terselenggaranya tugas pemerintah yang baik bagi kepentingan publik. Etika administrasi berusaha menentukan norma-norma mengenai hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur atau pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Fadillah dalam Daulima, (2018) bahwa Etika administrasi merupakan suatu cara dalam melayani masyarakat dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian etika administrasi adalah disiplin ilmu mengenai ajaran moral dan asas perlakuan yang baik bagi para administrator pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bidang pengetahuan ini diharapkan mampu memberikan berbagai asas kode etik, pedoman berperilaku, dan kebijakan moral yang dapat diterapkan oleh setiap pelaku birokrasi untuk terselenggarakannya pemerintahan yang baik.

Pada ruang lingkup administrasi negara atau pelayanan publik, etika di artikan sebagai filsafat dan profesinonal standar (kode etik) atau aturan berperilaku yang benar dan harus dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik.

4. Prinsip Etika Administrasi

Lewis dan Gilman dalam Umam, (2019) menyebutkan tiga prinsip atau nilai yang menjadi pedoman manajer publik, antara lain demokrasi, profesionalisme,

dan etika. Kemudian Fans Magnis Suseno (Umam, 2019) menjelaskan Etika dalam administrasi merupakan aplikasi dari prinsip moral dalam perilaku pejabat pada organisasi publik atau birokrasi. Prinsip moral diantaranya:

- a. Sikap baik, prinsip ini memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sebagai prinsip dasar, prinsip ini terakait dengan sikap dasar dari manusia yang harus mengetahui segala sikap konkret, tindakan, dan perilakunya. Prinsip ini pada dasarnya mengajak dengan mendekati sesuatu dengan berfikir positif.
- b. Prinsip keadilan di artikan bagaimana cara memberikan kebaikan kepada siapa saja seperti memberikan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Prinsip kebaikan mengajarkan kita bersikap baik terhadap siapapun. Akan tetapi kemampuan manusia dalam bertindak atau bersikap baik secara hakiki sangat terbatas. Oleh karena itu, jika kita berpikir secara logis sangat dibutuhkan prinsip tambahan yakni prinsip keadilan.
- c. Prinsip hormat terhadap diri yaitu prinsip lebih mengarah kepada pungi diri untuk tidak di salahgunakan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa prinsip moral dari pejabat manajerial saling berkaitan. Didasari dengan sifat baik artinya setiap melakukan sesuatu kita harus dasari dengan pikiran positif agar tindakan yang dilakukan terlihat baik di mata orang. Memiliki sifat baik seakan belum cukup dalam berinteraksi. Oleh sebab itu dibutuhkan sifat keadilan, seperti adil terhadap hak orang lain. Sifat tambahan ini lebih mengarah kepada pemikiran yang logis karena sifat baik seseorang terbatas dan di butuhkan sifat adil sebagai pelengkap.

Kedua sifat ini sejatinya bisa diterapkan dengan baik apabila seseorang mampu mengatur dirinya sendiri dengan tidak menyalah gunakan kehendak dan pikirannya. Oleh karena itu dibutuhkan prinsip hormat terhadap diri sebagai fungsi melakukan segala sesuatu.

5. Aliran Utama Dalam Etika

Chadler dan Plano dalam Umam, (2019) menjelaskan empat aliran utama dalam etika, yaitu sebagai berikut:

- a. *Empirical theory*, etika di turunkan dari pengalaman seseorang dan persetujuan umum.
- b. *Rational theory*, baik atau buruknya suatu perbuatan bergantung pada reasoning atau alasan dan logika yang melandasi perbuatan tersebut.
- c. *Intuitive theory*, etika tidak harus berasal dari pengalaman atau logika, tetapi dari institusi atau nurani.
- d. *Revelation theory*, yang benar atau salah berasal dari kekuasaan di atas manusia atau dari tuhan.

Berdasarkan bentuk aliran etika tersebut dapat disimpulkan bahwa etika berasal dari pengalaman manusia baik itu perbuatan baik dengan landasan logika atau hati nurani seseorang.

6. Manfaat Etika

Menurut Suseno menjelaskan tentang manfaat etika, yaitu:

- a. Mencapai suatu pendirian terhadap pandangan moral

- bahwa para birokrat sangat hati-hati dalam memberikan pelayanan hasil kepada publik;
- b. Efektivitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik harus dilakukan secara baik.
 - c. Kualitas pelayanan, yaitu kualitas yang di berikan oleh birokrat kepada publik harus benar-benar memberikan kepuasan.
 - d. Responsivitas, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab pejabat publik dalam merespon keluhan serta kebutuhan publik.
 - e. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik.

Menurut Dwiyanto dalam Saprudin et al., (2020) Etika dalam konteks birokrasi di artikan sebagai suatu panduan norma bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Etika birokrasi harus lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika dapat di jadikan sebagai pedoman, referensi, dan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan pegawai sebagai aparat birokrasi (administrasi negara) serta digunakan sebagai standar penilaian perilaku pegawai. Sehingga pegawai yang menjalankan tugasnya mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Menurut Rasyid dalam Endah, (2018). pemerintah hadir tidak untuk melayani dirinya sendiri tetapi hadir untuk melayani kepentingan masyarakat serta bagaimana menciptakan kondisi yang baik terhadap anggotanya dalam mengembangkan pelayanan publik dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan

besama yaitu pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan publik menurut Thoha dalam Endah, (2018). bahwa pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang di dalam instansi tertentu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

7. Ciri-ciri Etika Administrasi dalam pelayanan

Ahmad Amind dalam Umam, (2019) menyatakan bahwa Pelayanan publik yang profesional merupakan pelayanan yang proses pelayanannya terdapat akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparat pemerintah.

Ciri-cirinya adalah:

- a. Efektif, lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran
- b. Sederhana, prosedur pelayanan di selenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan, yaitu prosedur pelayanannya sangat terbuka seperti waktu penyelesaian pelayanan, perincian, biaya, serta hal-hal yang berhubungan dengan proses pelayanan. Semua itu wajib di informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
- d. Ketepatan waktu, yaitu pelayanan kepada masyarakat dapat terselesaikan dalam kurung waktu yang telah ditentukan.
- e. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap seperti cepat menanggapi hal yang menjadi masalah, keluhan, serta kebutuhan masyarakat.

- f. Adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap keluhan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, yang senantiasa mengalami perkembangan.

Berdasarkan indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi sangat berkaitan erat dengan etika pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.25, tahun 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu yang dibahas dalam undang-undang, yaitu mengenai perinsip nilai yang menjadi acuan perilaku dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, dibutuhkan rujukan perilaku yang baik saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Acuan perilaku yang dimaksud adalah: adil atau tidak diskriminatif; cermat, santun, ramah, tegas dan andal tidak memberikan putusan yang berlarut-larut; profesional; tidak mempersulit; patuh pada perintah atasan yang sah dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas; tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan dengan peraturan prundang-undangan; terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan kepastian dan terakhir tidak menyimpang dari prosedur (Umam, 2019).

8. Prinsip-prinsip Etika dalam Pelayanan

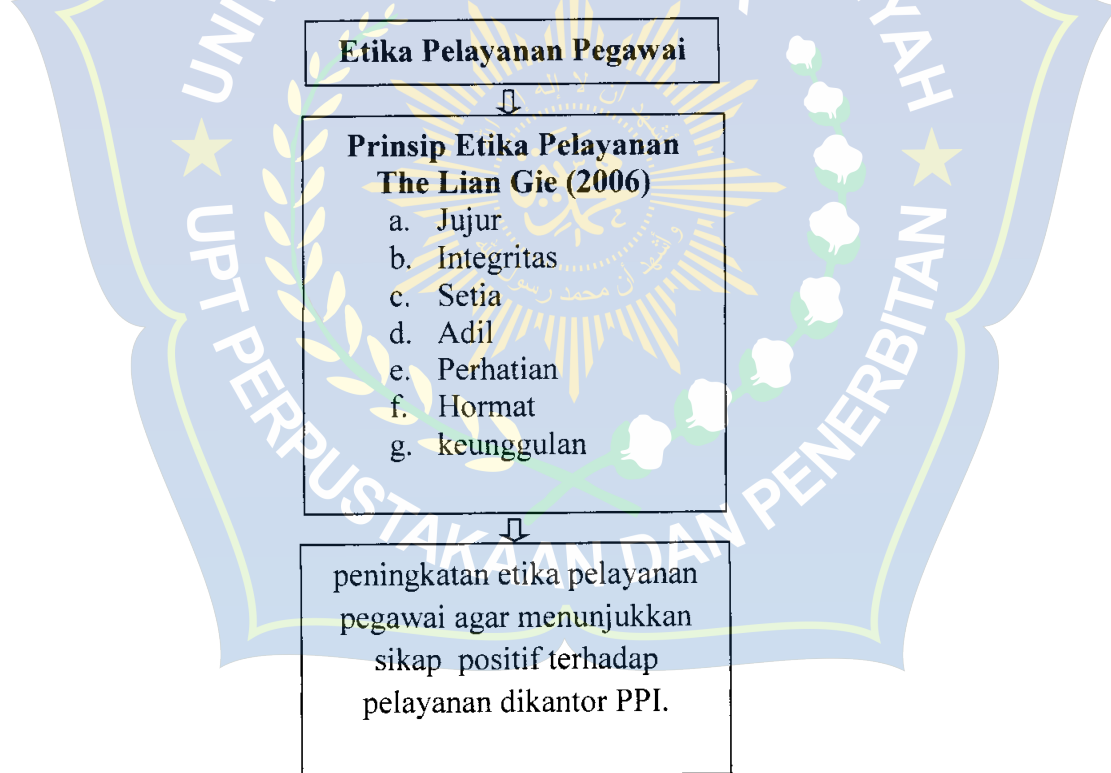
Prinsip Etika Pelayanan yang dikutip oleh The Liang Gie (2006) dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain :

- a. Jujur yaitu dapat di percaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit dalam melakukan pelayanan.
- b. Integritas yaitu mempunyai prinsip terhormat, konsisten dengan waktu, tidak mengorbankan prinsip moral dan tidak bermuka dua.
- c. Setia, yaitu loyal dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan.
- d. Adil yaitu memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi, menerima perbedaan serta berpikiran terbuka.
- e. Perhatian yaitu dapat dikatakan sebagai kepedulian dalam memperhatikan kesejahteraan orang lain dan memberikan kebaikan dalam pelayanan.
- f. Hormat yaitu nilai-nilai kesopanan, toleransi dalam menghormati martabat manusia serta privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang.
- g. Keunggulan yaitu memperhatikan kualitas pekerjaan dan melakukan perbaikan secara terus menerus..

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui tolak ukur Etika pelayanan pegawai pada kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, maka diperlukan sebuah teori dan konsep sebagaimana dikutip oleh The Liang Gie (2006) tentang penerapan prinsip etika pelayanan dengan indikator; Jujur yaitu dapat dipercaya dalam melakukan pelayanan seperti tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit dalam pelayanan; Integritas yaitu konsisten dalam melakukan pelayanan dan tidak mengorbankan prinsip moral. Setia, yaitu mentaati semua pelayanan yang dikerjakan. Adil yaitu

memperlakukan orang dengan sama dalam pelayanan, tidak memandang kasta dan pangkat. Perhatian yaitu memperhatikan dalam melakukan pelayanan ke orang lain, dan bagaimana memberikan kebaikan dalam pelayanan. Hormat yaitu menghormati setiap orang yang melakukan pelayanan. Keunggulan yaitu kecakapan atau kepandaian dalam melakukan pelayanan. Berdasarkan indikator tersebut, dapat dijadikan rekomendasi atau solusi terhadap peningkatan prinsip etika dalam melakukan pelayanan agar menunjukkan sikap positif terhadap pelayanan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji lebih dalam berdasarkan teori atau konsep dalam tinjauan pustaka. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Etika pelayanan pegawai dalam pemberian izin melaut pada kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan kajang Kabupaten Bulukumba yaitu prinsip-prinsip etika pelayanan yang di kemukakan oleh The Lian Gie (2006) berfokus pada kejujuran, Integritas, Setia, Adil, Perhatian, Hormat dan keunggulan.

E. Deskriptif Fokus

Deskriptif fokus pada penelitian ini, adalah:

1. Jujur yaitu dapat di percaya dalam melakukan pelayanan dengan melakukan hal-hal seperti tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang dan berbelit-belit dalam melakukan pelayanan di kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kabupaten Bulukumba.
2. Integritas yaitu sikap pegawai yang konsisten atau tidak berubah-ubah dalam melakukan pelayanan dan tidak mengorbankan prinsip moral saat melakukan pelayanan di kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
3. Setia, yaitu sifat yang menunjukkan ke taatan pegawai dalam melakukan pelayanan yang di kerjakan di kantor pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan selama 2 (dua) bulan, dari bulan mei sampai bulan juli setelah seminar proposal sampai data yang di dapatkan peneliti bisa sesuai dengan yang di butuhkan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan yang beralamat di Jln. Pelabuhan Kassi Kelurahan Tanah Jaya Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Alasan peneliti memilih Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin Melaut pada kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu, di karenakan di kantor ini terdapat permasalahan yang bersangkutan dengan etika pelayanan pegawai. Dimana permasalahan ini terjadi pada saat pembuatan surat izin. Berdasarkan hasil observasi dilapangan banyak keluhan yang peneliti dapat seperti pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan yang kurang baik serta membebani nelayan saat pengurusan administrasi. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian ditempat ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menguraikan dan menganalisis fenomenal, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan persepsi. Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena menggunakan latar alamiah atau objek apa adanya dan tidak

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat meneliti relatif tidak berubah. Kemudian bertujuan dengan maksud mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan sebagai proses pemecahan masalah yang di selidiki dengan data yang bersifat deskriptif. Maksudnya, data yang dapat berupa gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

C. Informan

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu. Informan penelitian yang dimaksud yaitu pegawai, masyarakat atau nelayan, pemilik kapal, pedagang ikan, dan tokoh masyarakat

Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang yang di dasarkan pada kemampuan dan pengalamnya untuk memberikan data atau informasi terkait proses pelaksanaan pemberian izin melaut dikantor PPI Pelabuhan Kassi kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.2 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	A. Muhammad Arfan, S.STPI	AF	Kepala kantor PPI
2.	Wahyuni SE	WY	Pegawai Kantor
3.	Mansyur	MS	Tokoh Masyarakat
4.	Amri	AI	Nelayan
5.	Faddi	FI	Nelayan
6.	Asso'	AS	Nelayan
7.	Sarifudding	SF	Nelayan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Pengumpulan data dengan wawancara yaitu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana di katakan bahwa wawancara (interview) yaitu suatu proses interaksi antara pewawancara (interview) dan informan atau orang yang di wawancarai secara berkomunikasi langsung.
2. Pengumpulan data Observasi yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian metode kualitatif. Observasi dapat

dikatakan sebagai pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lapangan.

3. Selain melalui teknik wawancara dan observasi dilakukan dengan mencari tau tentang fakta yang tersimpan baik dalam bentuk surat, catatan, dokumentasi foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

E. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu pemilihan, pemusatan latihan pada penyederhanaan data, pengabstrakan dari transformasi data besar yang diambil dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang didapat secara sistematis dan dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, Yaitu dilakukan sejak permulaan, pengumpulan data, tetapi karena tidak dapat mengadakan analisis, data yang banyak itu berbicara terlalu sedikit (Saebani & Sutisna, 2018).

F. Teknik Pengabsahan Data

Lexy Maelong dalam Saebani & Sutisna, (2018) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan data kualitatif terdapat beberapa kriteria, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*creadibility*)

Merupakan konsep pengganti validitas internal dalam penelitian.

2. Keteralihan (*transferbility*)

Merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, dimana bertujuan memperoleh generalisasi.

3. Ketergantungan (*dependability*)

Merupakan pengganti konsep reability dalam penelitian kualitatif. Reability tercapai apabila alat-alat ukur digunakan secara berulang-ulang dan hasilnya serupa.

4. Kepastian (*confirmability*)

Konsep ini pengganti konsep objektivitas dalam penelitian kualitatif. Dimana objektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti itu sendiri.



b. Iklim

Kabupaten Bulukumba hanya ada dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi atau di mulai pada Bulan juni sampai september. Sedangkan musim penghujan di mulai dari bulan desember sampai Maret. proses seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April samapi Mei dan Oktober sampa November. Jumlah rata-rata curah hujan di Kecamatan Kajang pertahunnya yakni 2000-3000 mm. Iklim di Kelurahan Tanah Jaya mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 C – 27.68 C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian, malaut dan tanaman perkebunan.

c. Topografi

Wilayah Bulukumba memiliki topografi yang bervariasi dari 0 meter hingga di atas 1000 meter di atas permukaan laut yang di bagi ke dalam tiga bagian:

1) Morfologi Daratan

Daerah dataran rendah dengan ketinggian anatar 0 s.d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan yaitu kecamatan Gantarang, Ujung bulu, Ujung loe, Bontobahari, Bonto tiro, Kajang, dan Herlang.

2) Morfologi Bergelombang

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100

meter dari permukaan laut meliputi bagian kecamatan: Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumba, dan Rilau Ale.

3) Morfologi perbukitan

Daerah Perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan: Kindang, Bulukumpa dan Rilau ale.

d. Jumlah Penduduk

Kecamatan Kajang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bulukumba yang terletak di bagian timur. Dengan luas wilayah keseluruhan adalah 129,06 km². Kecamatan Kajang terbagi atas 19 desa dan 2 kelurahan yaitu Desa Bonto Biraeng, Bonto Marannu, Lembang, Lembang Lohe, Pantama, Possi Tanah, Lembanna, Tambangan, Sangkala, Bonto Baji, Pattiroang, Sapanang, Batu Nilamung, Tanah Towa, Malleleng, Mattoangin, dan Lolisang, serta Kelurahan Tanah Jaya dan Laikang. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Kajang yang terdata di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba sebanyak 49,194 yang terbagi Laki-laki 23,425 dan perempuan 25,769. Dapat dikatakan dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kajang, Kelurahan Tanah Jaya yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 6307 jiwa.

Tabel 4.1

**Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin (orang) dan Desa/
kelurahan di Kecamatan Kajang 2020**

Desa / Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bonto Biraeng	1081	1213	2294
Bonto Marannu	1006	1141	2147
Lembang	1023	1208	2231
Lembang Lohe	934	1102	2036
Tanah Jaya	2975	3332	6307
Laikang	1027	1155	2182
Pantama	807	916	1723
Possi Tanah	580	645	1225
Lembanna	1398	1558	2956
Tambangan	1818	2065	3883
Sangkala	1261	1224	2485
Bonto Baji	1987	2099	4086
Pattiroang	978	1045	2023
Sapanang	798	765	1563
Batunilamung	925	1042	1967
Tanah Towa	1874	2148	4022
Malleleng	832	903	1735
Mattoanging	959	1048	2007
Lolisang	1162	1160	2322
Jumlah	23425	25769	49194

Sumber: Badan Pusat Statistic Kabupaten Bulukumba 2020

Berdasarkan tabel banyaknya penduduk di Kecamatan Kajang, dapat di katakan bahwa kelurahan Tanah Jaya yang jumlah penduduknya paling banyak.

e. Luas Area Perikanan

Berdasarkan tolak ukur area perikanan dari jarak area tangkapan ikan untuk perikanan tangkap (nelayan) berada pada batasan 2-4 mil sedangkan luas minimal area perikanan budi daya (empang, dan kolam terpal yaitu 200 hektar. Dilihat dari luas kawasan area perikanan budidaya di Kabupaten Bulukumba., Kecamatan Kajang memiliki luas area potensi 600 hektar, Hal ini menunjukkan bahwa luas area yang berada di kecamatan Kajang sangat luas.

Tabel 4.2

Produksi Perikanan (ton) dan Tahun menurut Desa / kelurahan di Kecamatan Kajang 2018

Jenis Perikanan	2014	2015	2016	2017	2018
Perikanan Laut	11996	11828	11016	9775	10589
Perikanan Budidaya:					
Tambak	1029	1313	1056	1276.9	1289.7
Kolam	14	18	23	13	16.4
Sawah	-	-	-	-	-
Jumlah	13039	13159	12095	11051.9	11895.1

Sumber: Badan Pusat Statistic Kabupaten Bulukumba 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat di katakan bahwa produksi perikanan hasil laut di kecamatan Kajang tidak menentu. Kita lihat pada tahun 2014 hasil pendapatan nelayan sangat tinggi, berbeda dengan tahun berikutnya yang mengalami penurunan. Kemudian pendapatan perikanan Budidaya yaitu pertambakan yang bisa di katakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan melampaui hasil perikanan laut.

Ada beberapa faktor yang terjadi sehingga pendapatan perikanan laut mengalami penurunan dan tidak menentu yaitu, faktor musim, dan cuaca. Ke dua faktor ini sangat berpengaruh terhadap pendapat nelayan (perikanan Laut) di karenakan musim ikan yang setiap tahunnya berpindah tempat kemudian musim ikan mengikuti pergerakan cahaya bulan. Yaitu ketika bulan terang dapat di pastikan ikan di lautan sangat sulit di dapat. Begitupun ketika bulan redup, keberadaan ikan sangat mudah di dapat. Walaupun seperti itu faktor cuaca yang jadi penentu bagi nelayan karena ketika gelombang tinggi, nelayan sangat kesulitan untuk melakukan pelayaran. Berbeda dengan Perikanan Budidaya tambak dan kolam yang bisa di katakan sangat sedikit hambatan dalam melakukan produksi.

Berdasarkan hasil penelitian, cara pemasaran dan pelelangan ikan nelayan di Kecamatan Kajang yaitu dengan cara memasarkan di lingkup PPI Pelabuhan Kassi. Selain membuka akses pembuatan surat izin melaut, juga membuka pemasaran serta melakukan pendataan mengenai hasil produksi ikan yang di dapat oleh nelayan setempat.

4. Lingkup Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kassi Kajang

a. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan kassi

Tabel 4.3

Jumlah fasilitas di PPI Kassi kajang Tahun 2020

No	Fasilitas	Ket
1.	Fasilitas Umum	Kantor PPI Dermaga Pabrik ES SPDN Cooldstorage
2.	Fasilitas penunjang	Drainase Gerbang PPI Penerangan PPI Kantin PPI Pos Jaga Rumas Dinas Mes Gedung Pelelangan Wisma nelayan Mushollah Pasar Tradisional

Sumber: Data profil PPI Pelabuhan Kassi Kajang 2020

b. Jumlah kapal nelayan

Pada tahun 2020 kapal yang telah terdata di Kantor PPI sebanyak 64 buah dari 78 buah kapal *purse seine* yang 12-30 GT (Groos Ton) yang mempunyai kelengkapan surat-surat untuk nelayan besar. Sedangkan untuk kapal pemancing atau nelayan kecil dari 150 buah kapal 4-10 GT (Groos Ton) yang telah terpantau hanya 10 kapal pemancing yang memiliki kelengkapan .

Tabel 4.4

Jumlah kapal dan kelengkapan surat izin

No	Jenis Kapal	Jumlah	Ket	
			Lengkap	Tidak
1.	Kapal besar <i>purse seine</i> yang 12-30 GT	78	64	14
2.	Kapal kecil <i>purse seine</i> 4-10 GT (Groos Ton)	150	10	140

Sumber: Data profil PPI Pelabuhan Kassi Kajang 2020

Pembuatan surat izin berlayar merupakan hal yang wajib di lakukan oleh setiap nelayan. Berdasarkan tabel tersebut dapat di katakan bahwa kapal dengan *purse seine* Groos Ton 12-30 masih ada yang tidak terdata

dalam pengambilan surat izin melaut. Begitupun dengan kapal *purse seine* 4-10 GT (Gross Ton). Yang menjadi alasan mengapa nelayan tidak membuat surat izin berlayar yakni jarak pelayaran biasanya tidak terlalu jauh dari daerah tempat tinggal yaitu hanya sekitar 10 mil. Berbeda dengan nelayan yang suka melakukan pelayaran jarak jauh dari daerah tempat tinggal harus membuat surat izin berlayar dikarenakan daerah penangkapan ikan yang biasanya di jaga oleh petugas kelautan di setiap perbatasan. Kemudian faktor pembayaran yang terbilang cukup mahal sehingga nelayan tidak membuat izin berlayar ketika ingin melakukan pelayaran.

c. Proses pembuatan Surat Laik Operasional (SLO) pembuatan Surat persetujuan berlayar (SPB) dan kriteria pemberian surat izin melaut

1) Pembuatan Surat Laik Operasional (SLO)

Menurut peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia No.1/permen-kp/2017 tentang surat laik operasi kapal perikanan. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan berlayar.

Adapun Kapal yang bisa menerbitkan surat laik operasional (SLO) yaitu: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan dan kapal pendukung

terkait dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan penerbitan surat laik operasional, maka ketentuan dalam pelayaran yaitu:

a. Fisik kapal

Pemeriksaan fisik kapal dilakukan oleh petugas syahbandar kepelabuhanan dengan cara memeriksa bagian kapal dan jika ada bagian kapal yang rusak petugas tidak memberikan surat laik operasioal Dengan maksud dan tujuan agar menghindari musibah yang terjadi dilautan. Fisik kapal yang dikatakan baik yaitu kuat dari hantaman ombak dan bisa menampung muatan sesuai dengan kapasitas

b. Alat tangkap

Dalam melakukan pelayaran alat tangkap merupakan alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan. Penggunaan alat tangkap biasanya menggunakan pukat cincin yang di setujui oleh pemerintah. Ukuran jaring pukat cincin maksimal memiliki panjang jaring 300 meter, lebar jaring/ kedalaman maksimun 60 meter dan ukuran mata jaring kantong pukat cincin dengan mesh size 1 inchi (2,54) Ada beberapa alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah seperti menggunakan pukat harimau dan melakukan Bom ikan. Alasan pemerintah melarang hal tersebut karena akan

merusak ekosisten laut. Selain itu ada beberapa alat tangkap yang dapat membantu dan diwajibkan untuk nelayan yaitu radio komunikasi, dan alat penyelam. Radio komunikasi berguna menginformasikan posisi kapal dan sangat membantu ketika nelayan dalam masalah. Kemudian alat penyelam membantu nelayan dalam memantau kondisi ikan dilautan.

c. Mesin

Mesin merupakan komponen yang paling penting dalam kapal nelayan karena kendala yang biasanya di dapat oleh nelayan yaitu dari mesin yang kurang baik. Mesin yang terdapat pada kapal nelayan ada tiga macam yaitu mesin untuk menjalankan kapal, mesin untuk kelistrikan dan mesin untuk menarik pukat (jaring). Pemeriksaan mesin biasanya dilakukan oleh petugas PPI dibantu dengan syahbandar kepelabuhanan. Mesin yang wajib digunakan oleh nelayan untuk menjalankan kapal biasanya menggunakan mesin mobil atau mesin yanmar V4- V8 yang memiliki daya tempuh jarak yang jauh dan lebih bertenaga. kemudian mesin yang digunakan untuk menarik pukat yaitu mesin gerdan dengan merk *yanmar* atau di sebut mesin gerdang. dan mesin kelistrikan atau biasa disebut dengan genset dengan 700-850 watt.

g. SKK (Surat Kecakapan Keterampilan)

Surat kecakapan keterampilan merupakan surat pembuktian bahwa nelayan tersebut memang pada keahliannya seperti SKK kapten atau nahkoda dan SKK di bagian mesin (Bas).

h. Pelampung

Baju pelampung atau jaket pelampung merupakan elemen yang harus ada dalam sebuah kapal laut. Kapal laut harus memiliki rompi atau pelampung penyelamatan. Standar pelampung untuk keselamatan mempunyai standar dasar yang harus di penuhi. Seperti harus dilengkapi dengan instruksi penggunaan yang jelas. Intruksi yang dimaksud yaitu dengan tulisan dan gambar. Kemudian rompi penyelamatan harus memiliki sumber cahaya 0.75 candlesticks selama 8 jam dan dilengkapi dengan klip dan tali yang dipasang sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir harus dilengkapi dengan pluit.

i. Daerah Penangkapan

Daerah penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI yaitu wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, lau teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di setiap daerah mempunyai batas penangkapan tersendiri, seperti

didaerah kecamatan kajang penangkapan hasil perikanan laut berjarak 1-10 mil. Diluar batas tersebut nelayan wajib melapor ke petugas syahbandar kepelabuhanan agar pada saat pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh petugas kelautan, nelayan tersebut tidak terkena razia atau penangkapan ikan ilegal.

Kelengkapan berkas seperti dokumen kapal, alat keselamatan perlu dilengkapi oleh nelayan sebelum melakukan pelayaran. Peraturan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, dan dari itu ketika nelayan tidak melengkapi sebelum melakukan pelayaran maka otomatis petugas syahbandar kepelabuhanan tidak akan memberikan izin untuk melaut, ada pun proses pemeriksaan kelengkapan, yaitu dilakukan oleh petugas syahbandar kepelabuhanan dengan mengecek semua perlengkapan.

kelengkapan dokumen kapal juga termasuk bukti bahwa pelayaran yang dilakukan oleh nelayan sudah mendapatkan izin dari petugas syahbandar setempat. Kelengkapan dokumen dan alat keselamatan sangat berguna. Jadi jika ada pemeriksaan di lautan yang dilakukan oleh petugas, nelayan hanya memperlihatkan bukti Surat Persetujuan Berlayar Surat Laik Operasional, surat resmi kepemilikan kapal, dan surat kecakapan atau SKK nahkoda dan SKK tukang mesin (BAS) yang sudah disetujui oleh syahbandar kepelabuhanan.

d. Aktivitas Nelayan dan Masyarakat di PPI Pelabuhan kassi

Tabel 4.8

Aktivitas masyarakat di Lingkup PPI Pelabuhan Kassi

No	Kegiatan	Uraian
Aktivitas Utama		
1.	Pendaratan Ikan	Kapal dengan Tonase 6-30 GT yang berlabuh per hari rata-rata 5 sampai 50 unit tergantung dari musim ikan,
2.	Pemasaran Hasil Tangkapan	cara pemasaran hasil tangkapan nelayan sudah menggunakan sistem lelang dan pemasaran menggunakan kesepakatan kelompok penjual ikan setempat .
3.	Penjualan BBM	Penjualan BBM ini di suplai melalui SPDN dan di kelola oleh Swasta, namun penjualan solar belum dapat mencakup ke seluruh kapal dan biasanya kapal membeli diluar SPDN.
Aktivitas Penunjang		
1	Perdagangan	Aktifitas pendaratan ikan begitu maksimal, karena adanya pasar tradisional yang mendukung. Dan dilingkup PPI ini sudah terdapat aktifitas perdagangan terdiri dari Penjualan Sembako, penjual sayuran, penjualan pakaian, penjual alat rumah tangga, penjual kue dan penjual mainan anak.

Sumber: Data profil PPI Pelabuhan Kassi Kajang 2020

pembayaran dalam pembuatan surat izin melaut, hasil penjualan dan karcis tambat labuh, bukan semata-mata di lakukan begitu saja tetapi sudah diatur dalam sebuah kebijakan. Pembayaran yang termasuk pada pembuatan surat izin (SPB dan SLO) yang di keluarkan oleh nelayan sebanyak Rp 100.000.00. Selain itu pembayaran kepelabuhanan yang di keluarkan oleh nelayan yakni jasa lelang penjualan ikan sebanyak 3% di atur dalam Perda No. 7 Tahun 1996 pasal 11 huruf C dan Tambat Labuh Kapal Rp 10.000.00. yang di atur dalam Perda No 12 Tahun 2019. Selain itu masih terdapat pembayaran yang di lakukan nelayan ketika ingin melengkapi surat kapal yakni pemeriksaan fisik kapal. perpanjangan ukuran kapal. surat kelaikan dan pengawakan kapal. Dan pembayaran ini wajib dilakukan untuk semua pemilik usaha kapal karena sudah di atur dalam perment-kp/2020 republik Indonesia No 15 pasal 5 ayat 2 huruf a, tentang perizinan kapal pengangkut ikan.

Tabel 4.9 Pembayaran di Lingkup PPI Pelabuhan Kassi

No	Pembayaran	Jumlah
1.	Surat izin	Rp. 100.000.00
2.	Karcis kendaraan	Rp. 3.000.00
2.	Jasa lelang	3% penjualan
3.	Tambat labuh kapal	Rp. 10.000.00
4.	Perpanjangan Sipi/ ukuran Kapal	Rp. 400.000.00
5.	Surat Kelaikan dan pengawakan kapal	Rp. 250.000.00
6.	Pemeriksaan Fisik Kapal	Rp. 200.000.00

Lebih lanjut menjelaskan:

“hasil dari pembayaran itu masuk pada pendapatan asli daerah . dan kalau boleh jujur dek, ada sebagian pekerja di sini saya yang mempekerjakan mereka kerana tidak mungkin semua pekerjaan yang ada di kantor PPI saya yang kerjakan. dan dari itu semua yang bekerja disini di beri upah dari hasil itu juga, yaitu pemungutan karcis dan biaya admnistrasi, sebagiannya masuk pada pendapatan asli daerah. Dan kalau kita pikir, kita mau gaji mereka pakai apa ? sedangkan disini hanya saya yang PNS.” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF bahwa kejujuran di kantor PPI sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita lihat wawancara di atas pemungutan pembayaran dari karcis tambat labuh dan biaya admistrasi lainnya masuk pada pendapatan asli daerah dan di sisihkan juga kepada pekerja yang bekerja di kantor PPI.

Dalam pembahasan penelitian ini akan di deskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang terkait tentang pembayaran dan akan disesuaikan dengan teori etika pelayanan.

Dengan adanya kejujuran dapat mengurangi rasa ke tidak percayaan masyarakat atau nelayan, dalam melakukan suatu pelayanan. Berikut adalah hasil wawancara dengan pegawai kantor

PPI yang menyatakan bahwa:

“sejauh ini belum ada masukan dari nelayan tentang keluhannya dalam masalah kejujuran. Dan terkait kejujuran juga kita selalu mengusahakan agar yang dikerjakan itu tidak mendapat respon yang tidak baik dari nelayan. seperti pada saat perjanjian ketika kami disini mengerjakan dokumen-dokumen nelayan, biasanya kami hanya menyuruh untuk mengumpul kemudian setelah itu kita janji untuk mengabarinya lewat telfon bahwa dokumen tersebut sudah selesai” (wawancara peneliti dengan WY pada

tanggal 31 juni 2021)

Hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa belum ada keluhan masyarakat yang tersampaikan secara langsung di kantor PPI. Begitupun dengan pegawai kantor ketika melakukan pelayanan selalu berusaha agar pelayanan yang diberikan harus terlihat baik oleh nelayan. Prinsip kejujuran selalu terakit dengan etika karena prinsip tersebut muncul dari kebiasaan. Jika pegawai tersebut sudah menerapkan hal seperti itu maka dapat dipastikan penerapan prinsip jujur sudah diterapkan dengan baik. Prinsip kejujuran dalam etika pelayanan berkaitan dengan prinsip kebaikan dalam konsep prinsip etika admnistrasi yaitu sikap baik memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sebagai prinsip dasar, prinsip ini menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kankret, tindakan, dan perilakunya. Prinsip ini pada dasarnya mengajak mendekati sesuatu dengan berfikir positif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di katakan nelayan setempat masih tidak berani menyampaikan keluhan tentang kejujuran pegawai yeng terkait dengan pembayaran dan pelayanan di kantor PPI.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan SF terkait masalah pelayanan sebagai berikut:

“bicara kejujuran dek dalam pengerjaan dokumen sudah bagus saya lihat, karena kemarin waktu pengurusan di janji jam sekian, pas itu ditelfon dan di suruh datang ke kantornya surat izin sudah selesai.” (wawancara peneliti dengan SF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa nelayan sudah mengatakan kejujuran pegawai sudah baik dalam melakukan pelayanan termasuk pada pengerjaan berkas, karena pegawai PPI menepati janji yang dibuat ketika membuat perjanjian terhadap nelayan.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AS terakait pembayaran di Kantor PPI sebagai berikut:

“kalau saya pribadi dalam pengurusan berkas sampai dengan pembayaran, bisa dikatakan sudah jujur dek, setiap urus surat kapal tidak pernah ada kendalanya seperti mau bohong` apalagi menipu.” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa nelayan tersebut sama sekali tidak pernah mendapat kendala apapun seperti di bohongi dan di tipu. Salah satu runtunya kepercayaan masyarakat atau nelayan biasanya dilihat dari kejujuran pegawai dalam melakukan pelayanan yang terlihat jelas. Ketika pelayanan berjalan sesuai dengan penerapan yang baik otomatis akan mendapat respon baik.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan FI sebagai berikut:

“Saya itu dek setiap urus surat-surat kapal jarang sekali memperhatikan, biasanya langsung mengurus saja, begitupun kalau di suruh bayar biaya administrasi saya itu langsung bayar saja. mau menipu atau berbohong itu urusannya yang penting saya sudah menyelesaikan kewajiban dengan membayar biaya administrasi” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa nelayan FI ketika melakukan pelayanan di kantor PPI Pelabuhan Kassi, ia tidak memperhatikan proses pelayanan pegawai, dan selama melakukan pelayanan di kantor PPI dia tetap mematuhi peraturan yang dibuat oleh pegawai kantor

Kebiasaan nelayan seperti ini seharusnya di ubah karena hal seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan. Alangkah baiknya ketika melakukan pelayanan harus mempertanyakan segala proses. Begitupun dengan pegawai Kantor harus menjelaskan semua proses pelayanan termasuk pembayaran agar tidak terjadi pelayanan yang menyimpan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara harus menjunjung tinggi standar etika yang luhur.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“kewajiban untuk membayar biaya admnistrasi kepelabuhanan memang harus diterima cuman permasalahannya banyak sekali pembayaran kalau urus surat-surat, apakah memang pembayarannya seperti itu atau tidak. Saya biasa curiga kenapa banyak sekali pembayaran seperti itu, tapi kita sebagai nelayan tetap menerima peraturan itu apalagi kita ini hanya masyarakat yang bisanya di atur dan menerima peraturan dari pemerintah” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021).

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa nelayan tersebut sudah mengatakan pembayaran di kantor PPI terakait dengan

pengurusan dokumen kapal memang sudah menjadi kewajiban yang harus di ikuti akan tetapi dia mengoreksi di bagian pembayaran yang katanya pembayaran atau biaya administrasi dalam pembuatan surat-surat kapal teralalu banyak.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pembayaran di lingkup PPI memang terbilang cukup mahal. Seperti pembayaran pada saat pembuatan SLO dan SPB yaitu sebanyak Rp 100.000.00, di mana pembayaran ini belum termasuk pembuatan surat-surat kapal lainnya seperti surat perpanjangan ukuran kapal, surat pengawakan dan pemeriksaan fisik kapal.

Lebih lanjut lagi wawancara dengan nelayan AI sebagai berikut:

Beda sekali pembayarannya itu dek kalau urus surat-surat kapal di makkassar, Malahan tertulis di kantornya pembuatan SPB dan SLO tidak di pungut biaya. Dari itu saya heran dengan pembayarannya di sini, kenapa sebanyak itu. (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021).

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan masyarakat MS terakait dengan pembayaran atau pemungutan karcis, sebagai beriktu:

“Kalau pembayaran karcis di sini itu dek banyak sekali, mulai dari karcis untuk sandaran perahu, bea penjualan ikan, . pokoknya banyak dek. tapi memang ada peraturannya begitu kulihat dan saya pernah baca,” ” (wawancara peneliti dengan MS pada tanggal 31 mei 2021).

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa memang pembayaran di lingkup PPI terbilang sangat banyak. seperti pembayaran karcis tambat labuh kapal, pembayaran bea untuk penjual ikan . Menurut masyarakat memang pembayaran tersebut ada dan ia

pernah membaca peraturannya.

Begitupun dengan pembayaran SPB dan SLO berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan bahwa pembayaran tersebut sebagai bentuk pelunasan administrasi yang sudah di sepakati oleh petugas kepelabuhanan dan nelayan setempat. Akan tetapi dalam pelunasan tersebut tidak ada bukti pembayaran yang diberikan oleh pegawai kantor ke nelayan. Sehingga banyak nelayan yang tidak percaya terhadap pembayaran tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat di simpulkan bahwa kejujuran pegawai di kantor PPI terkait masalah pengerjaan berkas dalam hal perjanjian pengerjaan berkas sangat jujur dan tidak berbohong, hanya saja dalam pembayaran administrasi tidak di jelaskan secara rinci bahwa kebijakan tersebut sudah ada yang mengaturnya. Sehingga dalam pembayaran tersebut ada sedikit koreksi dari nelayan yang merasa curiga terhadap pembayaran yang terlalu banyak. Dari hasil wawancara di atas bisa di katakan kejujuran pegawai di kantor PPI belum sepenuhnya baik.

b. Integritas

Integritas yaitu konsisten dalam melakukan pelayanan dan tidak mengorbankan prinsip moral. Konsisten dalam pelayanan diartikan ketetapan (tidak berubah-ubah) dalam melakukan pelayanan apakah dilakukan secara ikhlas atau ingin mendapatka pujian saja.

Berikut wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan WY sebagai pegawai kantor PPI:



... surat-surat kapalnya nelayan kita
... di

“lumayan bagus dek pelayananya dalam pembuatan surat izin, cuman itu biasanya bicara dua kali kalau melayani. Dan biasanya kita sendiri ke bonto bahari mengurus biasa juga dia yang kerja di kantornya.” (wawancara peneliti dengan SF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pembuatan surat izin melaut sudah di kerjakan dengan baik, hanya saja dalam pembuatannya ini terkadang tiba-tiba berubah.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AS sebagai berikut:

“bulan-bulan kemarin dek itu pelayananya kayak berubah-ubah. Biasa tidak bisa urus di sini, biasanya kita sendiri yang turun ke PPI Bonto bahari. Kalau sekarang kayak baik-baikmi saya lihat dan sudah bisa di kerjakan (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pembuatan surat izin melaut di kantor PPI sudah baik dari bulan sebelumnya, dimana pembuatannya itu berubah-ubah dan harus mendatangi dua kantor. Dapat dikatakan pelayanan yang berubah-ubah merupakan permasalahan yang sebaiknya di atasi karena akan berpengaruh terhadap kenyamanan nelayan. pelayanan yang berubah-ubah bisa dikatakan belum profesional karena tidak pemberi layanan tidak merespon dengan baik. sebagaimana ciri-ciri dari pelayanan yang profesional yakni pelayanan yang dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“tidak tau juga dek konsisten itu atau tidak, saya juga tidak bisa bilang konsisten karena ini pengurusan surat-surat kadang-kadang berubah, kadang di suruh turun di tanah beru kadang bisa juga di sini dan kayak tidak jelas sekali, maksud saya dek, kalau memang ada masalah, yah di selesaikan secepatnya’ karena kita juga ini nelayan capek pulang balek mengurus. Apalagi perjalanan ke bonto bahari jauh sekali” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa nelayan tidak mengetahui masalah konsisten atau tidak nya pegawai dalam melakukan pelayanan. nelayan lebih menjelaskan terakit masalah tempat pembuatan surat izin yang secepatnya harus di selesaikan. Karena bisa di katakan pembuatan surat-surat yang di lakukan di dua tempat sangat memberatkan nelayan.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan FI sebagai berikut:

“belum baik saya lihat dek, karena biasa kalau mengurus surat-surat kapal kayak tidak ikhlas kalau dia yang bawa berkas ke bonto bahari. banyak sekali ceritanya bilang bayar ini bayar itulah. Maksud saya jangan mi bertanya masalah pembayaran karena kita juga sebagai nelayan kalau mengurus mengerti, pasti kita kasih lebih dan tanpa dimintai kita pasti beri.” (wawancara peneliti dengan FI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa, pengurusan surat izin melaut biasanya pegawai kantor PPI sendiri yang membawa ke kantor PPI Kecamatan Bonto Bahari untuk di kerjakan. Akan tetapi menurut nelayan FI, pegawai kantor PPI dalam melakukan pelayanan kadang tidak ikhlas seperti meminta pembayaran lebih. Perlakuan pegawai seperti ini sudah bisa dikatakan mengorbankan prinsip moral-

karena ia melakukan pekerjaan ketika dia diberi pembayaran lebih.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, dapat di simpulkan bahwa pelayanan di kantor PPI belum bisa di katakan baik karena masih di temukan hal-hal yang memberatkan nelayan dalam pengurusannya seperti masalah tentang pembuatan surat persetujuan berlayar masih berubah-ubah yang harus mendatangi tempat lain yaitu di kantor PPI kecamatan Bonto Bahari. Kemudian pegawai kantor PPI seakan tidak ikhlas dalam membantu karena meminta pembayaran lebih. Tapi kita lihat wawancara diatas bahwa pegawai yang ada di kantor PPI kassi kajang tetap mengusahakan mengerjakan surat izin tersebut di kantor sendiri agar memudahkan nelayan mengurus surat-surat. Dan walaupun seperti itu pelayanan yang berubah-ubah dapat di katakan bahwa prinsip integritas pegawai di kantor PPI kajang kassi belum cukup baik.

c. Setia

Setia di artikan sebagaimana pegawai tersebut dalam bertindak, seperti bersifat loyal dan taat dalam melakukan pelayanan. Setia dalam melakukan pelayanan itu merupakan sifat yang baik, karena dengan cara seperti itu masyarakat atau nelayan merasa nyaman dalam melakukan pelayanan. Kesetiaan dalam pelayanan merupakan prinsip yang perlu diterapkan agar orang-orang saat melakukan pelayanan tidak merasa jenuh, seperti pada saat pelayanan respon pegawai yang seakan cuek dan malas saat melakukan pelayanan.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan AF selaku kepala kantor PPI:

“kami itu disini dek dalam melakukan pelayanan bisa di katakan 24 jam pelayanan, walaupun sebenarnya jam kerja pegawai di sini itu mulai jam 4 subuh sampai jam 11 siang.”
(wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pelayanan untuk pembuatan surat izin melaut itu 24 jam pelayanan. Walaupun sebenarnya jam kerja pegawai di kantor PPI itu dari pukul 4 subuh sampai jam 11 siang saja. Pelayanan dari jam 4 subuh sampai jam 11 khusus untuk memantau penjualan ikan dilingkup PPI selebih dari itu proses pelelangan ikan tidak diperbolehkan lagi.

Lebih lanjut menjelaskan:

“Kami buka pelayanan 24 jam itu karena biasa ada nelayan yang tiba-tiba mau urus surat izin berlayar, jadi biar malam kalau ada yang datang kita biasa langsung buatkan.”
(wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF dapat di simpulkan bahwa, pelayanan di buka selama 24 jam karena kedatangan nelayan saat mengurus surat-surat itu tidak menentu dan secara tiba-tiba. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan di lakukannya pelayanan 24 jam itu lebih memudahkan nelayan untuk mengurus surat izin tersebut. Tugas dari pegawai memang harus seperti itu memiliki sifat yang loyalitas agar nelayan ketika melakukan pelayanan tidak merasa di persulit. Apalagi keberangkatan dan kedatangan nelayan tidak menentu.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan masyarakat MS sebagai berikut:

“Memang dek, biar malam itu saya lihat kantornya tetap buka, kalau bukan di kantor pasti nelayan kerumah dinasnya.” (wawancara peneliti dengan MS pada tanggal 4 juni 2021)

Kali ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang sering beraktifitas di lingkup PPI pelabuhan kassi. Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pelayanan di kantor PPI memang melakukan 24 jam pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat di simpulkan bahwa pegawai dalam melakukan pelayanan di kantor PPI sudah setia di lihat dari beberapa pernyataan nelayan.

Yang di mana pelayanan pegawai hampir atau bisa di katakan 24 jam pelayanan. dengan maksud dan tujuan memudahkan para nelayan mengurus surat izin berlayar. Dari hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa kesetiaan pegawai kantor PPI sangat baik.

d. Adil

Adil yaitu memperlakukan orang dengan sama dalam pelayanan, tidak memandang kasta, pangkat dan ke keluargaan. Memiliki sifat yang adil juga sangat perlu di perhatikan dalam melakukan pelayanan, karena aspek seperti ini kadang kala lupa di perhatikan oleh si pemberi pelayanan sehingga menimbulkan ke cemburuan sosial.

Ke cemburuan sosial biasanya timbul dari perlakuan pegawai yang dimana hanya memihak pada orang tertentu. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan WY pegawai kantor PPI:

“Siapapun yang melakukan pelayanan di sini kami semua tidak pernah bilang mau pilih-pilih kasi sama nelayan, seperti di bedakan antara si A dan si B. pokoknya sama semua.” (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 mei 2021)

Lebih lanjut lagi menjelaskan:

Begitupun dengan pembayaran dek kami di sini kalau memberikan pembayaran itu sudah adil juga sesuai dengan peraturan yang berlaku (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat di katakan bahwa pelayanan pegawai di kantor PPI Pelabuhan Kassi semuanya sama dan tidak membeda-bedakan. Begitupun dengan pembayaran administrasi dan sebagainya.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan nelayan AS terakait masalah keadilan di kantor PPI:

“sudah adil dek, misalkan kalau cepatka kasi masuk berkas` cepat juga di kerja. Tidak pernah itu bilang cepat kasi masuk berkas lama baru dikerja.” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa ketika nelayan cepat mengumpul berkas, pembuatan surat izin juga cepat dikerjakan.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan SF sebagai berikut:

“Iya sudah adil, kalau berpihak ke orang lain belum pernah saya lihat dek” (wawancara peneliti dengan SF pada tanggal 31 mei 2021)

hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pegawai yang melakukan pelayanan sudah adil karena menurut nelayan selama ini belum terlihat pelayanan yang memihak pada satu orang saja.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“kalau masalah keadilan sudah adil mi juga dek, malahan adil sekali itu pelayannya di situ. kah kayak tegas juga kulihat kepala kantornya. Hanya saja itu saya koreksi di bagian pembayaran bea dari hasil yang di jual kah biar sedikit di jual tetap membayar orang” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa keadilan pegawai di kantor PPI sudah baik. keadilan ini terbentuk dari sikap kepala kantor yang tegas dalam memberikan intruksi pelayanan.

dalam wawancara ini nelayan mengoreksi di bagian pembayaran hasil jual yang tetap melakukan pembayaran walaupun hasil dari penjualan sedikit. Pembayaran yang dilakukan oleh nelayan walaupun penjualan sedikit ia tetap membayarakarena sudah menjadi peraturan di lingkup PPI.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian dapat di simpulkan bahwa keadilan pegawai di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi sudah adil.

Di jelaskan oleh pegawai kantor PPI bahwa dalam melakukan pelayanan dia memberi pelayanan sama ke nelayan. Dan di katakan

oleh nelayan bahwa belum terlihat pelayanan yang memihak ke satu orang.

e. Perhatian

Perhatian yaitu memperhatikan dalam melakukan pelayanan ke orang lain seperti bagaimana memberikan kebaikan, tidak mempersulit dan sebagainya. Perhatian bisa juga di katakan sebagai keingin tahuan masalah-masalah apa saja yang di rasakan masyarakat/ nelayan dalam melakukan pelayanan. dan bukan semata-mata bagaimana memberikan kebaikan saja dalam pelayanan.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan AF selaku kepala kantor PPI:

“kami disini dek selalu memperhatikan masalah nelayan. sebenarnya sudah banyak keluhan dari nelayan tentang pembuatan surat izin berlayar, kenapa harus mendatangi dua kantor... yah kita juga tidak bisa berbuat apa-apa dek, yang membuat keputusan itu dari atas.” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pegawai kantor sering memperhatikan keluhan dari nelayan seperti pembuatan surat izin berlayar. yang harus mendatangi dua kantor. Kita tahu bahwa di kantor PPI sudah beberapa bulan terakhir pelayanan tentang pengambilan suart izin berlayar di pindahkan untuk sementara waktu ke kantor PPI kecamatan Bonto bahari.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan:

“disini itu untuk pembuatan surat persetujuan berlayar sudah beberapa bulan ada permasalahan dalam pembuatannya, hanya surat laik operasional yang bisa kita buat (SLO). Tapi kita disini dek tetap mengusahakan untuk mengerjakan kedua surat tersebut biar nelayan tidak siksa yang di pinpong pulang balek urus surat-surat. Dan kita juga dek kasi pilihan mau di kerjakan di sini atau di PPI bonto bahari” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa pembuatan surat persetujuan berlayar sudah beberapa bulan mengalami permasalahan dalam pembuatannya dan hanya surat laik operasional yang bisa ia kerjakan. Tapi kita lihat ke inisiatifan pegawai yang memberi pilihan tempat pengerjaan surat-surat tersebut. dan demi kenyamanan pelayanan ia tetap membantu nelayan mengerjakan surat persetujuan berlayar.

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan:

“Saya suka dek kalau banyak keluhan dari nelayan yang tersampaikan, kalau perlu saya minta di demo sekarang. Dan dengan cara seperti itu saya punya bahan untuk menyampaikan ke atasan. Misalnya seperti ini, jika pemerintah dilempar dengan batu kecil tapi tidak mau menoleh, berarti kita harus melemparnya dengan batu yang besar. Seperti itu juga dek yang saya butuhkan sekarang dari nelayan. Saya minta di kritik dan kalau perlu itu di demo biar yang diatas tau bahwa nelayan sudah merasa di persulit dalam melakukan pelayanan.” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masukan atau keritikan dari nelayan sangat di butuhkan.

Karena dengan cara seperti itu pemerintah bisa tau bahwa pelayanan yang di cabut di kantor PPI berdampak pada nelayan yang-

melakukan pengurusan. Dan jika sudah banyak keluhan yang tersampaikan otomatis pelayanan yang ada di kantor PPI kecamatan bonto bahari, akan di pindahkan kembali ke kantor PPI kassi kajang.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan FI sebagai berikut:

“kalau masalah pembuatan surat izin dek saya biasa-biasa saja, kalau tidak bisa dikerja di pelabuhan yah terpaksa harus turun di bonto bahari” (wawancara peneliti dengan FI pada tanggal 4 Juni 2021)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa nelayan ini jika tidak bisa melakukan pelayanan di kantor PPI kassi dia tidak masalah ke kantor PPI kecamatan bonto bahari untuk membuat surat izin.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“Informasi yang ku dapat dek begitu, kita harus turun di tanah beru kalau mau ambil surat izin, tapi saya kemarin waktu keluar di pelabuhan alhamdulillah dibuatkan, jadi tidak turun di tanah beru.” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa nelayan setempat sudah tau pengambilan surat izin di lakukan di kantor PPI kecamatan bonto bahari, akan tetapi nelayan ini tetap ingin melakukan pelayanan di kantor PPI kassi dan alhasil pegawai yang ada di kantor PPI kassi masih bisa membuat kan surat izin tersebut.

Lebih lanjut lagi wawancara dengan pegawai WY mengenai keperhatiannya terhadap prosedur pemberian izin melaut sebagai berikut:

“Di sini itu dek kalau kita kasi surat izin melaut atau berlayar, di perhatikan dulu semua kondisinya terutama kondisi kapal, karena biasa ada nelayan yang berangkat ke laut tidak lengkap, seperti tidak bawa pelampung, kelengkapan surat-surat kapalnya juga tidak lengkap, biasa juga mesing kapalnya kayak tidak stabil. Jadi di periksa semua dulu itu. Karena kita juga tidak tahu di lautan cuaca seperti apa, dan semua ini di lakukan agar nelayan aman saat melakukan pelayaran”. (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa sebelum nelayan melakukan pelayaran, pegawai kantor PPI terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap fisik kapal dan kelengkapan dokumen, agar nelayan tersebut aman pada saat melakukan pelayaran.

Lebih lanjut menjelaskan:

“Kemudian dek kita juga tidak memberikan surat laik operasional kalau cuaca di laut itu kurang baik seperti pada saat gelombang besar dan angin kencang. Dan ini memang sudah jadi peraturan pelayaran sekarang”. (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di katakan bahwa pegawai kantor PPI tidak memberikan surat Laik Operasional ketika cuaca di lautan kurang baik karena akan berpengaruh pada keselamatan nelayan. Di buat kan peraturan seperti itu agar mengurangi kecelakaan laut. Dan peraturan tersebut sudah ada yang mengaturnya bahwa memang sudah ada dalam peraturan pelayaran.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AS sebagai berikut:

“di perhatikan memang semua dek sama pegawai yang bagian syahbandarnya, jadi kalau tidak lengkap itu kadang ki tidak disuruh melaut, begitupun kalau tidak bagus cuaca, kita juga tidak diberi SLO” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa memang pegawai kantor PPI yang bertugas di bagian syahbandar memeriksa kondisi kapal sebelum melakukan pelayaran dan begitupun ketika cuaca kurang baik, nelayan di larang untuk melakukan pelayaran.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pelayanan untuk pembuatan surat izin di lakukan di dua tempat. Yaitu PPI kecamatan bonto bahari dan PPI kassi kajang. Untuk pelayanan pembuatan surat persetujuan berlayar di lakukan di kecamatan bonto bahari dan pembuatan surat izin laik operasional (SLO) dilakukan di kantor PPI kassi. Sebenarnya sebelum ada masalah kedua pelayanan tersebut bisa dilakukan di PPI kassi. Ke inisiatifan pegawai kantor PPI kassi untuk mengembalikan pelayanan sangat besar.

Kemudian perhatian pegawai dalam pemberian izin melaut juga sangat baik. kita lihat beberapa wawancara di atas yang mengatakan bahwa pegawai kantor PPI Pelabuhan Kassi tidak memberikan Surat Laik Operasional (SLO) ketika fisik kapal dan cuaca buruk terjadi dilautan.

Dan kita bisa simpulkan bahwa ke perhatian pegawai kantor PPI kassi terhadap pelayanan sudah bisa di katakan baik karena ia selalu memperhatikan keluhan serta ke amanan nelayan setempat dan bagaimana cara agar nelayan tersebut bisa merasakan kenyamanan dalam melakukan pelayanan serta pelayaran.

f. Hormat

Hormat yaitu mengormati atau menghargai setiap orang yang melakukan pelayanan. Sikap hormat atau menghormati dalam pelayanan merupakan prinsip yang harus di lakukan, karena kita tau perasaan dari seseorang kadang merasa tidak nyaman dari perbuatan kita sehingga seseorang tersebut merasa tidak nyaman dalam berinteraksi dalam melaukan pelayanan. Prinsip hormat tidak lepas juga dari penampilan kita termasuk cara berpakaian dan cara berinterkasi. Oleh sebab itu prinsip hormat dalam pelayanan juga perlu di terapkan.

Berikut wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“pelayanan pegawai selama saya mengurus dokumen kapal, tidak pernah saya lihat kayak membentak apalagi marah-marah. Cuman itu kalau melayani kayak cuek sekali terutama pegawai yang di bagian pembuatan surat SLO.”
(wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pegawai di kantor sudah menghormati akan tetapi menurut nelayan pegawai kantor terlihat cuek dalam melakukan pelayanan.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan nelayan AS sebagai berikut:

“iye dek sudah sopan Begitupun dengan cara berpakaianya sudah bagus di lihat” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa terkait masalah kesopanan dalam berpakaian juga sudah baik.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan masyarakat MS sebagai berikut:

“kalau yang di bagian kantor kulihat kayak sudah sopan, yang di luar kantor biasanya dibagian pembagian karcis biasanya marah.” (wawancara peneliti dengan MS pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pegawai PPI yang berada di dalam kantor sudah sopan, hanya saja pekerja yang berada di luar kantor di mana yang mengurus masalah pembagian karcis di lingkup PPI kadang emosional.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi di lapangan, dapat di simpulkan bahwa pegawai kantor PPI sudah menerapkan prinsip menghormati dalam pelayanannya dan sudah cukup baik. Sebagaimana yang di jelaskan nelayan AI bahwa pegawai kantor PPI pelabuhan kassi tidak emosional dalam pelayanan dan di lanjutkan nelayan AS yang mengatakan pegawai sudah sopan dan cara berpakaianya juga sudah baik. Hanya saja pekerja yang bertugas di bagian pemungutan biaya karcis di lingkup PPI kadang marah sebagaimana yang di nyatakan oleh masyarakat MS.

g. Keunggulan

Keunggulan yaitu pegawai dapat memberikan hal positif dalam melakukan pelayanan. Keunggulan juga bisa di artikan sebagai kepandaian, atau kelebihan dalam melakukan pelayanan Seperti memiliki tata cara pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat atau nelayan.

Berikut wawancara peneliti dengan WY pegawai kantor PPI kassi kajang sebagai berikut:

“disini itu sudah di buat kan sistem untuk nelayan, pengurusan surat-surat kapal bisa dilakukan dirumah saja, tapi sampai saat ini belum bejalan karena anggaran pengadaan wifi di kantor belum cair.” (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 Juni 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa di kantor PPI kassi sudah di buat kan suatu sistem yang lebih memudahkan nelayan mengurus surat-surat kapal. Akan tetapi sistem tersebut belum bejalan karena anggaran pengadaan WiFi belum cair.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan kepala kantor PPI yang mengatakan:

“Iye dek kami di sini sebenarnya sudah memiliki beberapa sistem yang sebenarnya bisa membantu nelayan tapi kita terkendala di jaringan dek, ada pun sistem yang ingin kami terapkan itu, pembuatan surat berlayar bisa di lakukan di rumah saja lewat online. kemudian kami juga ingin menerapkan sistem yang bekerja sama dengan BMKG yaitu sistem yang mampu melihat bagaimana kondisi di lautan. Jadi misalkan di laut cuacanya kurang mendukung kita bisa langsung menginformasikan ke nelayan.” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa memang sudah ada perencanaan tentang pembuatan sistem di kantor PPI pelabuhan kassi, akan tetapi semua itu terhambat karena jaringan yang tidak mendukung. Adapun sistem yang ingin di terapkan yaitu sistem pembuatan surat izin berlayar lewat online dan sistem yang bekerja sama dengan BMKG tentang mengetahui keadaan cuaca di lautan.

Penerapan sistem ini tidak bisa terlaksana jika hanya di bicarakan saja. Penerapan sistem informasi memang di butuhkan untuk saat sekarang ini karena kita sudah masuk pada era modern yaitu segala sesuatu bisa dikerjakan tanpa datang ke kantor tersebut. akan tetapi semua itu percuma saja jika tidak ada penerapannya.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan terkait keunggulan di kantor PPI sebagai berikut:

“saya dengar-dengar begitu bakalan ada aplikasi yang kalau urus surat-surat lewat online saja. Tapi belum saya lihat orang pakai begitu, dari tahun kemarin begitu terus ceritanya, pelayanannya juga di PPI masih bgitu juga kayak tahun-tahun kemarin.” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa nelayan sudah mengetahui perencanaan di kantor PPI bahwa akan di terapkan sistem atau sebuah aplikasi yang dapat membantu nelayan dalam pengurusan surat-surat. Akan tetapi menurut nelayan setempat penerapan aplikasi tersebut sampai sekarang belum berjalan dan pelayanan di kantor PPI masih sama dengan tahun kemarin.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan AI sebagai berikut:

“Belum terlihat juga dek, kalau saya pribadi belum ada yang bisa di unggulkan karna pengerjaannya itu masih standar. Kita masih lama menunggu kalau di kerja surat-surat kapal, memang di kerjakan tapi kan kita juga sebagai nelayan mau lihat secepat apa pegawai kantor PPI dalam melakukan pelayanan. dan semua itu belum terlihat.” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa keunggulan pegawai di kantor PPI belum terlihat dan pengerjaan berkas masih standar. Menurut nelayan pembuatan surat izin memang dikerjakan akan tetapi proses pengerjaannya masih terbilang cukup lama. Yang diharapkan dari nelayan yaitu keunggulan dari pegawai karena selama ini nelayan belum merasakan pelayanan yang memudahkan di kantor PPI Pelabuhan Kassi.

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti dengan nelayan FI sebagai berikut:

“saya juga tidak tahu, dari tahun kemarin sampai sekarang setiap urus surat-surat kapal itu, begitu terus pengurusannya, kumpul berkas saja baru kita disuruh pulang. Sudah Tidak unggul kalau begitu. Dan biasanya itu kalau pengerjaan berkas saya lihat di kantor-kantor lain selalu cepat tapi kalau disini agak lama” (wawancara peneliti dengan FI pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa tata cara pelayanan pegawai di kantor PPI masih sama dengan tahun-tahun kemarin. Melakukan pelayanan dengan cara mengumpul berkas dan menyuruh nelayan pulang. Bisa di simpulkan bahwa keunggulan pelayanan pegawai belum ada peningkatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi, dapat di simpulkan bahwa keunggulan pelayanan di kantor PPI masih terlihat biasa saja dan belum cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi pengamatan peneliti, maka terdapat korelasi antara observasi dengan hasil penelitian. Berdasarkan observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Etika pelayanan pegawai di kantor Pangkalan pendaratan ikan (PPI) Pelabuhan kassi belum sepenuhnya terlihat baik, sedangkan hasil wawancara peneliti di lihat dari beberapa aspek terdapat prinsip yang sudah cukup baik walaupun ada sedikit kritikan. Seperti kejujuran pada saat pemberian biaya administrasi dan pembayaran karcis tambak labuh untuk nelayan, pegawai mejelaskan secara rinci dan memang sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku tapi kita lihat masih ada pembayaran yang tidak memiliki landasan aturan dari pemerintah yaitu pembayaran SPB dan SLO dan dari itu nelayan yang merasa curiga dengan pembayaran yang terlalu banyak. Kemudian integritas pegawai ketika melakukan pekerjaan, di mana di kerjakan secara konsisten, hanya saja dalam aspek ini dapat sedikit kritikan dari nelayan terkait peraturan yang sering berubah dan terakhir prinsip ke unggulan pegawai yang belum terlihat di mata nelayan. Selebihnya dari prinsip tersebut mendapat respon yang baik dari nelayan terkait aspek kesetiaan, keadilan, keperhatian dan prinsip menghormati dalam pelayanan.

mendapat kejanggalan. Proses pembayaran administrasi pada kantor PPI sangat beragam yaitu pembayaran karcis terbagi atas kendaraan, tambat labuh dan penjual ikan. Kemudian pembayaran jasa lelang yaitu 3% dari penjualan ikan. Selanjutnya pembayaran pembuatan surat izin melaut dan pembayaran lain yang mengenai dengan proses surat kelengkapan kapal.

Pembayaran dalam pembuatan surat izin melaut, hasil penjualan dan karcis, bukan semata-mata dilakukan begitu saja tetapi sudah di atur dalam sebuah kebijakan. Kemudian hasil dari pembayaran tersebut masuk pada pendapatan hasil daerah. Akan tetapi masih ditemukan keluhan dari nelayan setempat bahwa pembayaran dilingkup PPI sangat banyak.

b. Integritas

Pemerintah atau birokrat tidak lepas dari tanggung jawabnya yaitu melayani publik dengan sepenuh hati. Akan tetapi masih ditemukan pelayanan yang masih berbelit dan bisa dikatakan pelayanan yang tidak konsisten. Integritas dalam pelayanan merupakan proses bagaimana pengerjaan apakah menyusahkan atau tidak. Pelayanan yang menyusahkan atau masih berubah-ubah juga termasuk dalam masalah penerapan etika yang masih belum baik. penerapan prinsip integritas pada suatu pelayanan ditujukan sebagai menaruh perhatian terhadap pelaksanaan administrasi.

Integritas pelayanan di Kantor PPI bisa dikatakan tidak konsisten dalam melakukan pelayanan karena pengurusan dan pengerjaan berkas masih berubah-ubah. Hal ini terjadi karena pengurusan berkas harus mendatangi dua kantor dimana sebelumnya hanya dikerjakan di satu kantor saja. Penerapan prinsip integritas di kantor PPI bertolak belakang dengan ciri-ciri etika dalam administrasi yakni efektif dimana lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran. Kemudian pelaksanaan dilakukan secara sederhana seperti di selenggarakan secara mudah, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit. Walaupun seperti itu, pegawai kantor PPI tetap mengusahakan mengerjakan disatu tempat dan permasalahan yang terjadi secepatnya bisa diselesaikan.

c. Setia

Kesetiaan pegawai dalam melakukan pelayanan juga kerap kali mendapat respon yang buruk dari masyarakat. Seperti melakukan pelayanan dengan tidak bersungguh-sungguh sehingga penerapan prinsip setia atau kesetiaan tidak berjalan dengan baik. kesetiaan pegawai dalam pelayanan bisa dikatakan bagaimana pegawai tersebut bersifat loyal dan taat. Jika dilihat dari aspek administrasi prinsip kesetiaan di artikan sebagai melayani, membantu, memenuhi, menyelenggarakan, mengarahkan dan mendayagunakan.

Penerapan prinsip setia di kantor PPI sudah bisa dikatakan baik karena pegawai yang ada disana melakukan pelayanan 24 jam. Artinya kapanpun nelayan butuh untuk dibuatkan surat izin, pegawai kantor bisa membuatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala kantor PPI:

“kami itu disini dek dalam melakukan pelayanan bisa di katakan 24 jam pelayanan, walaupun sebenarnya jam kerja pegawai di sini itu mulai jam 4 subuh sampai jam 11 siang.”
(wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan memang pelayanan di kantor PPI dilakukan pelayanan 24 jam. Pelayanan seperti itu bisa dikatakan sangat mempermudah nelayan dalam melakukan pelayanan.

d. Adil

Perlakuan pegawai terhadap masyarakat dalam pelayanan biasanya banyak mendapat respon negatif , seperti penerapan prinsip keadilan yang tidak diterapkan dengan baik. akibat dari kelalaian tersebut biasanya terjadi kecemburuan sosial dalam pelayanan. Prinsip etika pelayanan sangat berkaitan dengan prinsip etika administrasi yang menjelaskan tentang prinsip moral dengan indikator prinsip keadilan. Di jelaskan bahwa adil pada hakikatnya berarti bagaimana cara kita memberikan kepada siapa saja sesuatu yang sudah menjadi haknya.

Prinsip keadilan pegawai pada kantor PPI Pelabuhan kassi sudah bisa dikatakan baik karena pegawai kantor dalam -

pemberian layanan tidak pernah memihak kesatu orang dan pelayanan yang ada disana semuanya sama, kemudian pemberian pembayaran juga adil dan tidak membedakan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Pegawai kantor PPI:

“Siapun yang melakukan pelayanan di sini kami semua tidak pernah pilih-pilih kasi sama nelayan, seperti di bedakan antara si A dan si B, pokoknya sama semua.”
(wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penerapan prinsip keadilan di Kantor PPI sudah di terapkan dengan baik.

e. Perhatian

★ Dalam pelayanan publik pemerintah harus peka terhadap keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Entah itu keluhan tentang pelayanan yang kurang baik, ataupun sebagainya. Tidak terfokus pada hal itu pemerintah juga harus memperbaiki keluhan yang rasakan oleh nelayan. Perhatian dalam pelayanan bisa dikatakan sebagai pemberian kebaikan. Seperti memperhatikan keluhan serta bagaimana memberikan hal-hal yang baik dalam pelayanan.

Pegawai kantor PPI dalam pemberian kebaikan bisa dikatakan sudah sangat baik karena ia selalu memperhatikan keluhan yang dirasakan oleh nelayan. seperti pada saat pembuatan surat izin berlayar banyak keluhan yang diterima oleh pegawai kantor dari nelayan dimana pengurusan berkas harus mendatangi dua kantor. Dari keluhan tersebut pegawai selalu memperbaiki kesalahan yang memberatkan nelayan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala-

Kantor PPI:

“disini itu untuk pembuatan surat persetujuan berlayar sudah beberapa bulan ada permasalahan dalam pembuatannya, hanya surat laik operasional yang bisa kita buat (SLO). Tapi kita disini dek tetap mengusahakan untuk mengerjakan kedua surat tersebut biar nelayan tidak siksa kasihan yang di pinpong pulang balek urus surat-surat. Dan kita juga dek kasi pilihan mau di kerjakan di sini atau di PPI bonto bahari” (wawancara peneliti dengan AF pada tanggal 31 mei 2021)

Selain itu bentuk perhatian lain pegawai kantor PPI yaitu ketika nelayan ingin melakukan pelayaran, Dimana pegawai kantor dan petugas syahbandar melakukan pengecekan kapal terlebih dahulu dan memberikan informasi ke nelayan tentang cuaca dilautan. Dengan maksud dan tujuan agar nelayan dalam pelayaran tidak terkendala atau mendapat masalah di lautan.

f. Hormat

Prinsip hormat atau menghargai dalam pelayanan sangat penting diterapkan karena dengan cara menghormati, masyarakat merasa dihargai. Penerapan prinsip hormat sangat berkaitan dengan perilaku seseorang. Kode etik bagi aparat pemerintah termasuk pegawai negeri diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri. Kode etik pegawai dalam hal ini di artikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan cara bergaul.

Prinsip menghormati pegawai pada kantor PPI sudah bisa dikatakan baik karena dalam pelayanan pegawai melayani dengan

baik dan tidak emosional. Begitupun dengan cara berpakaian yang sudah sopan, sebagaimana di jelaskan oleh nelayan:

“iye dek sudah sopan Begitupun dengan pakaiannya sudah bagus di lihat” (wawancara peneliti dengan AS pada tanggal 31 mei 2021).

Dapat di katakan pelayanan yang di lakukan oleh pegawai sudah menerapkan prinsip menghormati. Pelayanan seperti ini akan mendapatkan respon positif dari nelayan, karena prinsip menghormati sangat berkaitan dengan perlakuan dari dalam diri kita. Jika kita sopan, menghargai, maka kita akan mendapatkan perlakuan baik juga dari orang lain.

g. Keunggulan

Keunggulan pegawai dalam pelayanan menjadi point tambahan karena dengan adanya prinsip keunggulan akan lebih memudahkan nelayan dalam melakukan pelayanan, keunggulan pelayanan meliputi kecakapan, kepandaian dan menggunakan cara yang berbeda dalam pelayanan. Hal tersebut berakaitan erat dengan etika dimana muncul dari kebiasaan. Jika kebiasaan tidak dirubah maka tidak akan ada peningkatan dalam organisasi tersebut, karena organisasi dikatakan berhasil apabila pelayanan yang ada di dalamnya sudah berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya jika penerapan pelayanannya kurang baik, dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut tidak berhasil dalam melakukan pelayanan.

Keunggulan pegawai di kantor PPI Pelabuhan kassi belum terlihat atau belum diterapkan dengan baik. keunggulan yang dimaksud yaitu adanya pelayanan yang mendukung seperti penggunaan sistem aplikasi. Pelayanan pegawai pada kantor PPI Pelabuhan Kassi masih terlihat biasa sebagaimana di katakan oleh nelayan:

“Belum terlihat juga dek, kalau saya pribadi belum ada yang bisa di unggulkan karna pengerjaannya itu masih standar. Kita masih lama menunggu ketika surat-surat kapal dikerjakan, memang dikerjakan tapi kan kita juga sebagai nelayan mau lihat secepat apa pegawai kantor PPI dalam melakukan pelayanan, dan semua itu belum terlihat.” (wawancara peneliti dengan AI pada tanggal 31 mei 2021)

Penerapan prinsip keunggulan seperti penggunaan sistem informasi memang sangat dibutuhkan agar pelayanan yang dilaksanakan bisa terselesaikan dengan cepat. Akan tetapi terdapat kendala dalam penggunaan sistem tersebut seperti, jaringan yang tidak mendukung dan pengadaan wifi yang belum terlaksana. Sebagaimana yang dijelaskan WY pegawai Kantor PPI:

“disini itu sudah di buatkan sistem untuk nelayan, pengurusan surat-surat kapal bisa dilakukan dirumah saja, tapi sampai saat ini belum bejalan karena anggaran pengadaan wifi di kantor belum cair.” (wawancara peneliti dengan WY pada tanggal 31 Juni 2020)

Keunggulan pegawai tidak dilihat dari penerapan sistem itu saja. Masih banyak bentuk prinsip keunggulan yang bisa di katakan bahwa pegawai tersebut sudah unggul. Seperti kecakapan atau kepadaian dalam pelayanannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat di simpulkan bahwa:

- a. Kejujuran pegawai di Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dalam pengerjaan berkas sudah sangat jujur hanya dalam pembayaran belum bisa di katakan baik karena pegawai kantor tidak menjelaskan secara rinci terkait peraturan dalam pembayaran administrasi. Oleh karena itu kejujuran pegawai kantor PPI belum sepenuhnya baik.
- b. Integritas pegawai di Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba belum cukup baik di karenakan pelayanan yang masih berubah-ubah membuat nelayan merasa di persulit.
- c. Kesetiaan pegawai Kantor Pangkalan Pendarata sudah baik di katakan seperti itu karena pegawai kantor membuka pelayanan 24 (dua puluh empat) jam yang lebih yang memudahkan nelayan dalam mengurus surat izin melaut.
- d. Adil atau keadilan pegawai dalam melakukan pelayanan pada kantor Pangkalan Pendaratan Ikan Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang

Kabupaten Bulukumba sudah terlihat baik karena sejauh ini belum terlihat oleh nelayan pelayanan yang memihak ke lain orang.

Di jelaskan pula oleh pegawai bahwa pelayanan di kantor PPI itu sama antara si A dan si B.

- e. Perhatian atau cara pemberian kebaikan dalam pelayanan di kantor PPI sangat baik dan sangat perhatian. Sebagaimana di ketahui pelayanan untuk pembuatan surat izin di lakukan di dua tempat. Dengan di terapkannya kebaikan pelayanan di kantor PPI sangat membantu nelayan dalam pengurusan. Begitupun dengan pemberian surat laik operasional yang pemberiannya mementingkan keselamatan nelayan.
- f. Hormat atau cara menghargai pegawai di kantor PPI sudah baik, sebagaimana di katakan nelayan dalam pelayanannya yaitu sudah menghormati. Kemudian masalah berpakaian yang di katakan sudah sopan.
- g. keunggulan pelayanan yaitu pemberian hal positif dalam pelayanan. keunggulan di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dapat di katakan masih terlihat biasa saja dan belum ada peningkatan dan belum terlihat faktor pendukung dalam pelayanan.

B. Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk pegawai kantor PPI lebih meningkatkan prinsip-prinsip etika dalam melakukan pelayanan termasuk kejujuran dalam

memberikan pembayaran administrasi dan karcis tambak labuh untuk nelayan. Kemudian harus lebih konsisten dan meningkatkan keunggulan dalam pelayanan. Selbihnya harus mempertahankan prinsip-prinsip yang di anggap nelayan sudah baik.

2. Disarankan untuk pegawai kantor lebih terbuka dan mengurangi jumlah pembayaran pada pembuatan surat izin berlayar.
3. Disarankan untuk masyarakat atau nelayan setempat lebih berani menyampaikan aspirasi atau saran ke pegawai kantor PPI, agar pegawai tersebut bisa memperbaiki kesalahan serta membenahi pelayanan yang menyusahkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Asih, N. M. S. (2018). Implementasi Etika Administrasi Negara Sebagai Upaya Untuk Mencegah Korupsi. *Raad Kertha*, 01(02), 94–104.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>
- Daulima, F. (2018). Implementasi Etika Pejabat Publik Di Sekretariat Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(50), 1–8.
- Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141–151. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1088>.
- Febrie, H. (2017). Etika dan Akuntabilitas Sektor Publik. *Spirit Publik*, 12(1), 75–82. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/16244>
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 48–58.
- Kurniawati, D., Syafi'i, A., & Widiyanto, M. K. (2018). Penerapan Etika Administrasi Dalam Rangka Mengembangkan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya. 1–11.
- Saebani, A., & Sutisna, Y. (2018). *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*. Cv Pustaka
- Saprudin., Kusworo., & Mulyati, D. (2020). Etika pegawai dalam pelayanan publik di kecamatan konda kabupaten konawe selatan provinsi sulawesi tenggara. *Visioner*. 12(3), 605–614.
- Satibi, I., & Ediyanto. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>
- Soamole, M., Rorong, A. J., & Rompas, S. (2015). *Implementasi Kebijakan Etika Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara*. 2(29).
- Sukri, J., Idris, M., & Burhanuddin. (2017). Penerapan Etika Administrasi Negara Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Kantor Badan Kepegawaian Dan

Diklat Daerah Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 112. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.897>

The Liang Gie. (2006). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Umam, K. (2019). *Etika Admnistrasi*. Cv Pustaka Setia.

Wawan., & mayrudin, M. M. (2020). Etika Pejabat Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance*. 2(1), 1-17.

Yuniningsih, T. (2018). Etika Administrasi Publik. In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9), 21-25 <http://www.elsevier.com/locate/scp>



RIWAYAT HIDUP



SUDARMAN lahir di Kajang Tanggal 02 February tahun 1999 anak pertama dari pasangan Ayahanda Sudirman dengan Ibunda Ani. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 disekolah dasar SD Negeri 101 Kajang Kassi kemudian lulus pada tahun 2011.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 19 Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan lagi di Sekolah menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bulukumba dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Alhamdulillah selesai tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Etika Pelayanan Pegawai Dalam Pemberian Izin Melaut Pada Kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pelabuhan Kassi Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”.